



PERAN WISATA HALAL DALAM MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT

Qiwamudin¹, Nurul Huda²

¹Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia

²Universitas Yarsi

E-mail: qiwamudin@ui.ac.id, nurul.huda@yarsi.ac.id

Abstrack

Halal tourism has played an important role in driving the economy of West Nusa Tenggara (NTB). The community also participates in becoming halal tourism actors and also gets an economic surplus. This cannot be separated from the increasing number of foreign tourist arrivals from countries with Muslim populations. This study uses a literature study approach with comparative descriptive analysis using demand and supply theory. The results of the study show that the concept of halal tourism developed in NTB has shown significant results in driving regional economic growth at 7 percent. Theoretically, it can be seen through the supply and demand that occurs. Where the increasing number of foreign tourists coming from Muslim-populated countries was accommodated by the NTB government by developing tourism.

Keyword: *halal tourism, economic growth, supply and demand, and Nusa Tenggara Barat*

Abstrak

Wisata halal telah memainkan peranan penting dalam menggerakkan perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB). Masyarakat juga turut serta menjadi pelaku wisata halal juga mendapatkan surplus ekonomi. Hal ini tidak lepas dari meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara yang berasal dari negara yang berpenduduk muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi Pustaka dengan analisis deskriptif komparatif dengan menggunakan teori permintaan dan penawaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa konsep wisata halal yang dikembangkan di NTB telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah diangka 7 persen. Secara teoritis, dapat dilihat melalui *supply and demand* yang terjadi. Di mana meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara yang berasal dari negara berpenduduk muslim diakomodir oleh pemerintah NTB dengan mengembangkan wisata.

Kata Kunci: *Wisata halal, pertumbuhan ekonomi, supply and demand, dan Nusa Tenggara Barat*

Pendahuluan

Konsepsi tentang industri halal dapat didefinisikan dari berbagai perspektif, dimana sebagian praktisi menganggapnya sebagai komoditas ekonomi yang dapat menciptakan pasar untuk kepentingan perekonomian negara. Salah satu turunan dari industri halal dalam dunia parekraf adalah pariwisata halal (*halal tourism*). Pengembangan halal tourism ini didasarkan pada tiga hal. Pertama dari besarnya jumlah penduduk muslim dunia. Menurut survei yang dilakukan *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2022* (2021: 263) jumlah penduduk muslim dunia mencapai 1,938,613,645. Banyaknya masyarakat muslim menjadi potensi pada pariwisata halal sebagai media rekreasi dan liburan. Namun, perlu diingat bahwa pariwisata halal bukan hanya untuk muslim, melainkan bersifat



universal. Wisata halal menjangkau semua aspek bukan dengan latar keagamaan selama masih mengikuti kaidah syariah yang dijadikan sebagai pedoman pelayanan (Surur, 2020: 117)

Kedua, berdasarkan studi MasterCard dan CrescentRating (2022: 21) kunjungan wisatawan muslim international mencapai 160 juta pada tahun 2019 dengan dibukanya perjalanan international pasca pandemi covid-19, kunjungan wisatawan muslim diproyeksikan mencapai 140 juta tahun 2023, 160 juta tahun 2024 dan bisa mencapai 230 juta pada tahun 2028. Studi MasterCard dan CrescentRating merupakan laporan tahunan *Global Muslim Travel Index* (GMTI) yang dimulai sejak tahun 2011, dilihat dari laporan setiap tahun yang dikeluarkan, kunjungan muslim pada pariwisata halal terus meningkat, hanya pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan karena terjadi pandemic covid-19 di seluruh dunia, kemudian meningkat kembali pada tahun 2022.

Ketiga, sektor pariwisata merupakan pasar yang memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestic Bruto (PDB). PDB global yang disumbangkan sektor travel dan pariwisata sebesar 10,40% dan mampu menyerap 313 juta pekerjaan atau 9,9% memberikan peluang kerja kepada yang memerlukan. *World Travel and Tourism Council* (WTTC) dalam laporannya *Travel and Tourism Economic Impact* (2022: 5) menjelaskan bahwa pada tahun 2020 travel dan pariwisata mengalami kerugian hampir USD 4,9 triliun, dengan kerugian globalnya terhadap PDB menurun sebesar 50,4% dari tahun ke tahun, dibandingkan dengan penurunan 3,3% ekonomi global.

Berdasarkan tiga alasan di atas, dapat dikatakan bahwa masyarakat muslim merupakan potensi pasar industri halal yang sangat besar. Tidak mengherankan jika beberapa negara di dunia berusaha untuk mengembangkan *halal tourism* di negara mereka agar dapat menarik wisatawan muslim mancanegara. Salah satu negara yang berupaya untuk mengembangkan konsep *halal tourism* adalah Indonesia. Indonesia melihat potensi ekonomi yang besar untuk pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) dari iklim pariwisata halal. Pariwisata menjadi tumpuan Indonesia dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan, selain sebagai devisa negara (Mutiarlinda, 2020: 2).

Kecenderungan industri pariwisata global yang berlomba menggaet wisatawan muslim mendorong pemerintah Indonesia melalui kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk mengembangkan layanan pariwisata yang ramah terhadap wisatawan muslim di Indonesia. seperti halnya negara-negara lainnya, pengembangan layanan wisata ramah terhadap wisatawan muslim bertujuan untuk merebut pangsa pasar yang cukup besar dari negara-negara muslim dunia, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Qatar. Ketiga negara tersebut masih menjadi negara dengan pengeluaran wisatawan muslim terbesar di dunia (DinarStandard, 2022: 99).

Pada laporan yang dipublikasikan oleh GMTI mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2022, posisi pariwisata Indonesia pernah menempati urutan 1 sampai urutan 6 dunia. Urutan pertama yaitu pada tahun 2019, namun skor akhirnya sama dengan Malaysia yaitu 78. Mestinya Indonesia mampu mengungguli Malaysia jika melihat keindahan pulau yang ada di Indonesia. Posisi pariwisata halal Indonesia turun kembali pada tahun 2021 menjadi nomor 4 dunia dibawah Malaysia, Turki dan Arab

Saudi dan baru bangkit kembali pada tahun 2022 menjadi nomor 2 setelah Malaysia. Indonesia sudah berhasil memboyong beberapa penghargaan pada pariwisata halal yaitu *World's Best Halal Honeymoon Destination* dan *World's Best halal Tourism Destination* pada tahun 2016 untuk pariwisata halal di NTB (Surur, 2020: 164).

Nusa Tenggara Barat (NTB) menarik untuk dikaji lebih dalam terkait sektor pariwisatanya, karena di provinsi ini pertama kalinya terbit peraturan gubernur nomor 51 tahun 2015 tentang wisata halal dan peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal. NTB juga merupakan provinsi andalan Indonesia di kancah International dalam mempromosikan pariwisata halal Indonesia. Kajian pariwisata halal NTB sudah banyak dibahas seperti penelitian Lukman Santoso tentang *Dilema Kebijakan Wisata Halal di Pulau Lombok* dan penelitian Devi Andriyani tentang *Pengaruh Destinasi Wisata Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Nusa Tenggara Barat*.

Penelitian Lukman memaparkan realita provinsi NTB sebagai tombak pariwisata halal, ternyata masih menyisakan banyak permasalahan di masyarakat. Sementara penelitian Davi mengukur kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di NTB dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung dan tingkat hunian hotel berpengaruh positif dan signifikan. Dua penelitian terdahulu merupakan gambaran pariwisata halal yang sudah diterapkan, namun kedua penelitian baik Lukman maupun Davi belum menyentuh aspek pada percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Barat setelah adanya kebijakan pariwisata halal. Sejauh mana kontribusi pariwisata dilihat dari berbagai variable berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif dengan sifat deduktif agar menjelaskan peran dari pariwisata halal yang di implementasikan oleh provinsi nusa tenggara barat bisa menunjang dalam percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Adapun analisis pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif komparatif, menurut Sugiono (2017: 20) deskriptif komparatif menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan objek yaitu pariwisata halal yang ada di Nusa Tenggara Barat yang sesungguhnya untuk dianalisis permasalahan yang dihadapi kemudian dibandingkan dengan kondisi kesejahteraan dan pembangunan ekonomi daerah.

Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber utama penelitian yang diambil dari Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat No 51 tahun 2015 dan Peraturan Daerah No 2 tahun 2016 serta data yang terangkum dalam website pemerintah NTB. Data sekunder diambil dari studi pustaka berupa baik online maupun offline seperti buku, artikel jurnal, skripsi yang masih ada kaitan dengan penelitian sebagai pelengkap untuk memperkaya data primer.

Pada pengolahan data menurut Rahmadi (2011: 91) dapat dilakukan dengan beberapa hal, pertama dengan pencatatan semua data yang diperoleh, kedua data yang sudah diperoleh direduksi

hanya data yang sesuai yang diambil agar tidak terjadi penumpukan data, ketiga data yang sudah dipilih kemudian dikelompokkan berdasarkan tema serta diidentifikasi mana yang valid dan tidak, terakhir data disimpulkan untuk dijadikan sebuah argument yang tepat dan valid.

Kerangka Teori

1. Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah NTB tahun 2015 dan 2016

Peraturan Gubernur nomor 51 tahun 2015 terdiri dari 9 halaman yang mengatur bagaimana wisata halal dijalankan dan apa saja perangkat yang harus ada pada wisata halal. Pada pergub tahun 2015 terdiri dari tujuh bab dan 17 pasal yang memiliki ruang lingkup destinasi, pemberian penghargaan atau reward, peran serta masyarakat, dan pembinaan dan pengawasan. Masing-masing ruang lingkup pada pergub tersebut nantinya dijabarkan apa saja yang harus ada pada destinasi sampai bagaimana teknis pengawasan dan pembinaanya.

Peraturan gubernur NTB nomor 51 tahun 2015 kemudian diturunkan menjadi peraturan daerah (perda) nomor 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal yang terdiri dari 10 bab dan 30 pasal. Pada peraturan ini memuat ruang lingkup yang sama dengan pergub nomor 51 dengan beberapa tambahan yaitu destinasi, pemasaran dan promosi, industri, kelembagaan, pembinaan dan pengawasan dan pembiayaan. Hadirnya pergub dan perda di NTB merupakan upaya pemerintah NTB agar optimal dan maksimal dalam mengelola pariwisata halal di NTB.

Pengertian pariwisata halal menurut peraturan daerah NTB ialah konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah pada pariwisata agar pelayanan dan fasilitas yang disediakan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah. Wisatawan yang berkunjung mendapatkan perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan kewajiban ibadah selagi melakukan aktifitas pariwisata. Pariwisata halal berdasarkan perda nomor 2 tahun 2016 dibagi dua yaitu destinasi dan industri pariwisata.

Pengelola destinasi pariwisata halal wajib menyediakan fasilitas pendukung untuk pariwisata halal seperti fasilitas wudhu, tempat dan perlengkapan sholat. Penyedia jasa pun tidak luput dari kewajiban memenuhi unsur-unsur syariah jika ingin menjadi bagian dari pariwisata halal seperti informasi masjid, arah kiblat hotel, tempat sholat, makanan halal dan sarana prasana yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Industri pariwisata halal juga dituntut agar memiliki sertifikat halal pada produk makanan minuman demi menjamin kehalalannya. Selain itu sarana pendukung seperti SPA, sauna dan griya pijat harus dipisahkan antara laki-laki dan perempuan terutama terapinya serta sesuai dengan prinsip syariah dalam melakukan kegiatannya.

2. Teori Permintaan dan Penawaran

Penawaran dan permintaan merupakan dua istilah yang sering digunakan baik pada ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Berupa kekuatan-kekuatan yang membuat perekonomian pasar bekerja, serta menentukan kuantitas setiap barang yang diproduksi dan harga ketika barang tersebut

terjual. Sebagai kebutuhan terhadap suatu produk yang ditunjang oleh sejumlah uang untuk membelinya (Hakim, 2012).

Teori permintaan dalam ekonomi islam tidak semata untuk memenuhi kebutuhan (*needs*) manusia tetapi dalam rangka untuk memenuhi kelangsungan hidup dan bukan berlebih-lebihan, bermewah-mewahan, dan bersombong-sombong. Permintaan dalam islam dikaitkan dengan kebutuhan dan kebutuhan ditentukan oleh konsep masalah. Masalah ialah seorang yang berkonsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan sehingga memperoleh kemanfaatan yang setinggi-tingginya dalam kehidupan (Permana, 2020) atau biasa dikenal dengan istilah masalahat al-ibad (kesejahteraan hakiki bagi manusia).

Permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa, dalam Islam, dibatasi pada hal-hal yang diperbolehkan untuk dikonsumsi atau diperjual belikan. Batasan ini tidak dikenal dalam teori ekonomi kapitalis yang bersifat netral dari nilai termasuk nilai-nilai agama. Produksi islam bukan hanya dilarang mengakibatkan kerusakan dalam memanfaatkan alam dan lingkungan, artinya ia tidak boleh mengakibatkan hutan menjadi gundul dan berubah menjadi lahan kritis yang mengakibatkan banjir dan longsor, menimbulkan polusi yang diatas ambang batas yang aman bagi kesehatan. Produksi islami juga haram menghasilkan produk-produk yang apabila dikonsumsi akan menimbulkan kerusakan, baik itu rusaknya kesehatan, apalagi rusaknya moral dan kepribadian (Permana, 2020).

Aturan etika dan moral yang membatasi kegiatan produksi tersebut tentu saja berpengaruh terhadap fungsi penawaran barang dan jasa sebagai contoh, apabila suatu proses produksi menghasilkan polusi, maka biaya lingkungan dan sosial tersebut harus harus dihitung dalam ongkos produksi sehingga ongkos meningkat penawaran akan berkurang. Dampaknya kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Di negara barat, hal tersebut telah dilakukan dengan mengenakan pajak polusi atau dikenal dengan istilah *pigouvian tax* yang tujuannya agar perusahaan memperhitungkan biaya eksternal yang timbul akibat kegiatan produksinya sehingga memengaruhi keputusan produksi dan penjualannya (Muflihin, 2019).

Pembahasan

1. Implementasi Wisata Halal dan Pembangunan Zona Ekonomi Khusus di Lombok

Konsep *halal tourism* menjadi tren baru dalam dunia pariwisata Indonesia. Hal ini tidak lepas dari minat masyarakat yang tinggi untuk melakukan perjalanan ke berbagai destinasi wisata, baik di dalam maupun luar negeri. *Halal tourism* mencakup pemahaman makna halal di berbagai aspek kegiatan pariwisata mulai dari penginapan, sarana transportasi, konsumsi, dan destinasi dengan berlandaskan nilai dan syariat islam (Huda, N & Pohan, A. R, 2021). Beberapa daerah juga telah merespon perkembangan halal tourism dengan mengeluarkan peraturan daerah (perda) seperti peraturan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 2 Tahun 2016 tentang *halal tourism*. Tujuan utama dari perda tersebut adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan

muslim agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan penuh kesukacitaan (Huda, N., Rini, N., & Hidayat, S, 2021).

Berkenaan dengan implementasi wisata halal dan pembangunan sumberdaya manusia melalui nilai-nilai lokal (identitas Islami), pemerintah telah menetapkan Mandalika Resort sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2014 yaitu mengembangkan kawasan wisata seluas 1.175 hektar. Pengembangan Kawasan Mandalika sebenarnya sudah dimulai di era Orde Baru dari tahun 1987. Setelah beberapa tahun karena krisis moneter dan berbagai alasan lainnya, pada tahun 2011 akhir, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhyono meresmikan dimulainya masterplan pembangunan kawasan Mandalika Resort. Namun lagi-lagi pembangunannya mengalami banyak hambatan sehingga dilanjutkan lagi di era pemerintahan Jokowi. Mandalika Resort ditangani langsung oleh ITDC (*Indonesia Tourism Development Corporation*), salah satu BUMN Indonesia yang menyatakan bahwa Mandalika ini akan menjadi kawasan terpadu yang elit, eksklusif dan bertaraf internasional. Seperti Nusa Dua di Bali yang sukses dikembangkan ITDC sebelumnya (Subarkah, 2017).

Pembebasan lahan menjadi masalah utama dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan itu juga terjadi di kawasan Mandalika yang cukup lama berhenti beroperasi yang menjadikan lahan kawasan ekonomi khusus ini perlu di rekontruksi ulang. Lahan tanah KEK pun sudah dipergunakan kembali oleh masyarakat sekitar baik sebagai lahan pertanian maupun tempat tinggal. Proses pembebasan lahan dan rekontruksi ulang batas tanah kawasan Mandalika resort hampir rampung sebelum dilakukan peresmian langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2017. Dimulainya pembangunan infrastruktur dasar yang sudah dibangun antara lain akses jalan dalam kawasan, fasilitas pengolahan air bersih, masjid, pembangunan pagar kawasan, penataan ruang publik, dan sebagainya.

Wujud dari rekontruksi lahan kawasan Mandalika berdampak pada mulai teraturnya proses pembangunan yang ada karena dari batas tanah yang hilang dan masih diragukan keberadaannya dan bisa ditentukan kembali dengan memasang tanda batas dan dilakukan pembangunan pagar batas kawasan. Selain rekonstruksi lahan, upaya pembangunan Zona Kawasan Ekonomi Khusus juga memerlukan adanya rekonstruksi sosial masyarakat sekitar kawasan. Hal ini diupayakan sebagai bagian dari pembangunan sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan sadar hukum dan tuntutan warga untuk pembangunan yang bersesuaian dengan norma dan nilai setempat khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus di Mandalika Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah NTB.

Upaya pembangunan karakter identitas Islami bersumber dari al Quran dan Hadist melalui pendidikan Islam. Pendidikan Islam yang dimaksudkan disini adalah suatu proses bimbingan seorang pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal peserta didik ke arah terbentuknya pribadi Muslim yang baik, karena pendidikan islam merupakan alat yang dapat difungsikan untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia kepada titik optimal kemampuannya untuk

memperoleh ketentraman hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Rekonstruksi sosial melalui pembentukan karakter budaya yang Islami bertujuan untuk memupuk, meramut, dan menciptakan generasi penerus yang bukan hanya dapat menjalankan kehidupan moderen, tetapi sekaligus dapat merepresentasikan identitas Islami yang dapat eksis dalam aktivitas yang bersifat multikultural, termasuk dalam kegiatan pariwisata. Karakter itu perlu diwujudkan dengan pembinaan yang menghasilkan sumber daya manusia yang unggul yang bisa menghadapi Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai ikon pariwisata yang maju di pulau Lombok.

Bagi masyarakat setempat, pemahaman agama Islam dan pelekatan identitas Islami menjadi hal yang penting bagi keberlangsungan generasi. Bagi mereka, akal pikiran yang dinamis dan progresif yang dibangun melalui pendidikan karakter identitas Islami mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan karakter yang baik (Subarkah, 2018). Budi pekerti menjadi sangat penting untuk penanaman nilai-nilai moral dan nilai-nilai sosial pada masyarakat pelaku industri pariwisata, karena pengaruh globalisasi membawa dampak menipisnya etika termasuk sopan santun dan diabaikannya tatanan masyarakat setempat hanya untuk mengejar keuntungan ekonomi semata-mata.

Para kapitalis yang mulai tertarik pada keberadaan lahan tanah di sekitar KEK Mandalika mulai merasakan adanya potensi besar memperoleh keuntungan dari investasi pariwisata. Mereka mulai memilih dan menjadikan wisata tersebut sebagai komoditas baru yang dengannya akan meraup keuntungan yang tak terkira. Hal ini dilakukan dengan cara mengembangkan kegiatan yang lebih banyak bersandar pada aktivitas konsumsi khususnya bagi para turis, sehingga ikut mempengaruhi perilaku warga setempat. Perilaku dalam kegiatan konsumtif merupakan akumulasi dari konsumsi tanda dan simbol yang melekat pada terminologi pariwisata. Padahal hakikatnya, hanya berupa perwujudan simbol status, prestige, dan kepuasan akan bujuk rayu kapitalis dalam ikon-ikon pariwisata (Awalia, 2017: 19-30).

Pengembangan wisata halal yang berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat khususnya dipulau Lombok berhasil mendatangkan wisatawan mancanegara secara signifikan. Tak hanya itu, wisatawan lokal juga menjadikan Lombok sebagai destinasi wisata mereka. Ketika berwisata ke Lombok, para wisatawan tidak hanya dimanjakan dengan keindahan pantai yang luar biasa, tetapi mereka juga bisa menikmati wisata religi. Tidak mengherankan jika wisatawan mancanegara dan lokal terus berdatangan ke NTB dan mendatangkan nilai ekonomi. Berikut data kunjungan wisatawan mancanegara dan lokal di NTB:

Tabel 1. Kunjungan Wisawatan Mancanegara tahun 2014-2020

N O	Bulan	Wisatawan Mancanegara						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Januari	45,715	40,927	57,298	78,209	89,234	50,877	15,120
2	Februari	40,774	45,912	64,278	89,217	101,756	56,451	12,294
3	Maret	43,845	43,871	61,419	86,033	97,902	62,446	9,413
4	April	53,764	72,100	100,940	109,733	181,329	103,557	70

No	Bulan	Wisatawan Mancanegara						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	Mei	66,190	77,112	107,957	134,649	192,006	124,903	145
6	Juni	84,118	93,176	130,446	171,054	199,177	155,387	138
7	Juli	65,172	196,433	271,197	194,677	206,813	181,002	302
8	Agustus	77,667	109,526	153,335	199,885	1,412	196,508	459
9	September	90,449	137,250	192,150	137,889	33,443	122,668	244
10	Oktober	57,639	70,248	90,494	128,451	25,120	132,891	610
11	November	56,733	50,279	83,866	90,452	25,110	153,663	448
12	Desember	70,240	74,312	90,948	92,396	51,254	210,438	739

Tabel 2. Kunjungan Wisatawan Nusantara tahun 2014-2020

Bulan	Wisatwan Nusantara						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	62,836	56,507	79,110	91,745	104,873	76,392	52,744
Februari	56,321	63,012	88,217	99,267	112,429	78,225	48,381
Maret	61,284	61,337	85,872	97,277	111,254	79,113	32,553
April	70,469	57,102	79,943	164,599	275,443	152,698	2,720
Mei	76,089	71,318	99,845	164,571	227,311	172,445	2,465
Juni	90,942	97,121	135,969	209,065	239,522	258,336	8,947
Juli	64,374	142,091	198,927	280,743	310,219	277,908	18,379
Agustus	98,702	192,046	268,864	269,330	18,346	284,651	29,473
September	78,168	251,491	352,087	244,900	50,165	167,004	27,669
Oktober	62,442	71,066	100,765	220,300	33,275	188,326	39,880
November	69,341	65,019	101,532	209,907	33,702	194,009	44,602
Desember	85,848	71,271	98,978	197,337	91,284	226,454	52,800

Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat

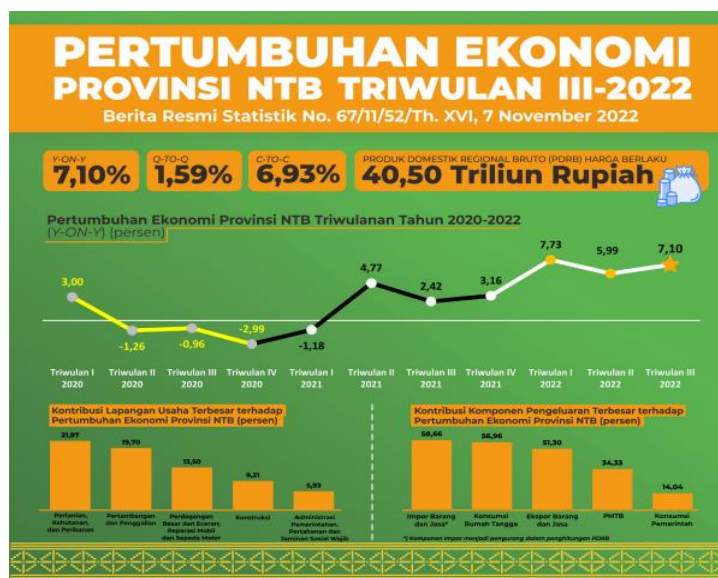
2. Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan wisata selain mampu menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga sangat berpengaruh bagi perekonomian masyarakat. Dampak lain bagi masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah mendukung sepenuhnya pariwisata di Indonesia, kawasan wisata yang dikelola secara optimal akan sangat berpotensi mendongkrak ekonomi masyarakat. Dampak positif lainnya juga dapat dilihat dari daerah yang mulai berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah kawasan wisata dan juga mengembangkan kawasan wisata yang telah dimilikinya. Kesadaran pemerintah tentang potensi kawasan wisata disambut baik oleh masyarakat dan menciptakan keselarasan antara masyarakat dan pemerintahan dalam menciptakan kawasan wisata yang optimal.

Kawasan wisata merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian suatu daerah karena diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pendapatan daerah. Kawasan wisata juga bersifat *multiplier effect* yang mampu mendorong sektor-sektor lain seperti misalnya sektor perdagangan dan jasa, hunian, tenaga kerja, untuk ikut tumbuh dan mampu berkembang bersamanya. Hal ini juga didukung dengan pernyataan Pendit (2003: 35), yang mengatakan bahwa pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat terutama dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standard hidup serta stimulus bagi perkembangan sektor lainnya.

Pariwisata juga merupakan suatu sektor yang tidak jauh berbeda dengan sektor ekonomi yang lain yaitu dalam proses perkembangannya juga mempunyai dampak atau pengaruh dibidang sosial ekonomi dan fisik kawasan. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut dapat berupa pengaruh positif maupun negatif terhadap kehidupan masyarakat setempat (Pelu, I. E. A., Kurniawan, R., & Akbar, W., 2019). Untuk mencegah perubahan itu menuju ke arah negatif maka diperlukan suatu perencanaan yang mencakup aspek fisik, sosial dan ekonomi, sehingga sedapat mungkin masyarakat setempat ikut terlibat di dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata di kawasan wisata tersebut.

Menurut (Mankiw, 2012), pertumbuhan ekonomi adalah gambaran kapasitas perekonomian dalam sebuah negara yang memiliki keterkaitan kebijakan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan produktif dengan menambah penghasilan masyarakat. Berikut gambaran kondisi pertumbuhan ekonomi di provinsi NTB:



Tabel 3. Gambaran Pertumbuhan Ekonomi NTB 2020-2022

Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan gambar diatas dapat dikatakan kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB sangat fluktuatif. Padahal dengan potensi wisata yang luar biasa dapat menunjang pertumbuhan

ekonomi. Menurut (Bicer & Gunawan, 2018) Sector pariwisata akan menunjang pertumbuhan ekonomi jika adanya promosi daerah. kegiatan untuk mempromosikan pariwisata daerah adalah sebuah strategi penting dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah (Andriyani, D., & Damanik, 2022).

Adanya kegiatan mempromosikan pariwisata maka bisa dijadikan sebagai pemicu untuk meningkatkan perekonomian dan menarik para wisatawan. Semakin banyak wisatawan berkunjung menunjukkan perkembangan pariwisata daerah tersebut berjalan dengan baik. Berikut grafik perkembangan jumlah wisatawan yang berkunjung ke provinsi NTB. Ekonomi NTB pada triwulan III 2022 tumbuh 7,10% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,99% (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan utamanya didorong oleh peningkatan jumlah wisatawan yang terus meningkat pasca terkendalanya penyebaran Covid-19. Selain itu, UMKM lokal dan ekonomi masyarakat juga terus berkembang dampak dari kedatangan wisatawan.

Kesimpulan

Wisata halal tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus saling sinergi dari semua pihak yang menjadi bagian dari keseluruhan industri halal, termasuk sektor finansial dan pembiayaan. Oleh karena itu diperlukan kerjasama untuk mendorong pengembangan wisata halal. Melalui pengembangan wisata halal, harapannya dapat mendorong perekonomian masyarakat dan negara agar menjadi lebih baik. Masyarakat akan memperoleh penghasilan dengan berbagai pekerjaan dan penjualan/penyewaan di sekitar tempat wisata, negara akan memperoleh devisa sebagai pemasukan kekayaan negara. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat dan masyarakat akan semakin meningkat. Tak mengherankan jika pertumbuhan ekonomi NTB berada diangka 7 persen walaupun sempat dilanda covid-19.

Pengembangan wisata halal harus di dukung oleh semua pihak, pemerintah dan rakyat harus saling bersinergi untuk mengembangkan potensi wisata halal yang mempunyai prospek cerah di masa depan. Pulau Lombok (NTB) yang menjadi salah satu tujuan wisata halal Indonesia menorehkan prestasi yang luar biasa. Menurut BI, Pulau yang terkenal dengan seribu masjidnya ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi tujuan wisata halal. Puncaknya adalah Lombok memenangkan dua penghargaan internasional sekaligus, yakni World Halal Travel Award (WHTA) 2015 kategori World Best Halal Tourism Destination dan World Best Halal Honeymoon Destination. Dalam CNBC Indonesia pada tahun 2017, kunjungan turis di Lombok meningkat tajam hingga 50% setelah ditetapkan menjadi destinasi wisata halal dan mendapat penghargaan tersebut. Pada majalah Tempo April 2019, Lombok meraih peringkat pertama kategori wisata halal terbaik di Indonesia versi Indonesia Muslim Travel Index (IMTI). Lombok menjadi yang terbaik setelah memperoleh skor 70.

Daftar Referensi

- Andriyani, D., & Damanik, H. (2022). *Pengaruh Destinasi Wisata Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)*. *el-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 5 (1): 53-68.
- Awalia, H. (2017). *Komodifikasi Pariwisata Halal NTB dalam Promosi Destinasi Wisata Islami di Indonesia*. *Jurnal Studi Komunikasi*. 1 (1): 19-30.
- Bahardeen, Fazal, dkk. (2022). *Global Muslim Travel Index 2022*. Singapura: MasterCard-CresenRating.
- Bicer, I., & Gunawan, E. (2018). *Pengaruh Kunjungan Wisatawan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Tengah*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*. 3 (3): 370-378.
- Cushman, D. O. (2012). *Mankiw vs. DeLong and Krugman on the CEA's real GDP forecasts in early 2009: what might a time series econometrician have said?*. *Econ Journal Watch*. 9 (3): 309-345.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga.
- Huda, N., Rini, N., & Hidayat, S. (2021). *Pariwisata Syariah: Sebuah Pendekatan Teoretis dan Riset*. Jakarta: Prenada Media.
- Huda, N. & Pohan, A. R. (2021). *Preferensi Masyarakat Milenial Muslim Terhadap Pariwisata Halal (Studi: Daerah Khusus Ibukota Jakarta)*. *Jobs: Jurnal Orientasi Bisnis dan Entrepreneurship*. 2 (1). 66-68.
- Mcdonald, James. dkk. (2022). *Travel and Tourism Economic Impact 2022*. United Kingdom. World Travel and Tourism Council.
- Muflihini, M. D. (2019). *Permintaan, Penawaran Dan Keseimbangan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Mikro Islam*. *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*. 4 (2): 185-195.
- Mutiari Linda, B. I. (2020). *Pegembangan Wisata Halal untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kota Mataram*. *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. 19 (2): 221-469.
- Pelu, I. E. A., Kurniawan, R., & Akbar, W. (2019). *Pengembangan wisata syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (studi wisata halal Nusa Tenggara Barat)*. Palangkaraya: IAIN Palangkaraya.
- Pendit, S. N. (2003). *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Permana, I. (2020). *Teori Penawaran Dalam Ekonomi Islam*. *JEBSIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. 2 (1): 6-20.
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 tahun 2015 tentang Wisata Halal.
- Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Subarkah, A. R. (2017). *Strategi City Branding Nusa Tenggara Barat Menjadikan Lombok sebagai Destinasi Pariwisata Halal*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Subarkah, A. R. (2018). *Potensi dan Prospek Wisata Halal dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)*. *Sospol: Jurnal Sosial Politik* 4 (2): 49-72.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Surur, Fadhil. (2020). *Wisata Halal Konsep dan Aplikasi*. Kabupaten Gowa: Alaudin University Press.
- Thomson Reuters. (2022). *State of the Global Islamic Economic Report 2022 Unlocking Oportunity*. Dubai: Salaam Gateway Dinar Standard.